

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tidak dapat disangkal bahwa perubahan lingkungan sedang terjadi saat ini. Menurut penelitian Kahn et al. (2019), perubahan lingkungan mempunyai dampak jangka panjang terhadap perekonomian dan jika tindakan pencegahan tidak diambil, diperkirakan akan menurunkan PDB per kapita dunia sebesar 7% pada akhir abad berikutnya. Rezai et al. (2018) menemukan bahwa perubahan lingkungan pada akhirnya akan menurunkan produktivitas bisnis, investasi, dan profitabilitas. Investor menganggap keuntungan bukan satu-satunya evaluasi investasi, tetapi juga masalah lingkungan. Oleh karena itu, kemampuan perusahaan untuk bertahan saat ini didasarkan pada berbagai faktor, yaitu profitabilitasnya dan pada kemampuannya bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai kinerja ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (Hardiyansah & Agustini, 2021).

Paradigma bisnis berubah dari yang mengutamakan keuntungan semata menjadi mengutamakan *profit, people, dan planet* dengan *triple bottom line* yang juga mempertimbangkan dampak lingkungan perusahaan (Wiranata, 2014). Menentukan nilai perusahaan memerlukan evaluasi investor. Karena harga saham merupakan cerminan nilai perusahaan, persepsi investor

terhadap reputasi perusahaan dapat berdampak pada harga saham (Kurnia et al., 2020). Hal ini membuat perubahan lingkungan menjadi perhatian banyak orang, termasuk pemerintah internasional (Muhammad & Aryani, 2021).

Pemanasan global adalah topik yang banyak diperdebatkan saat ini di seluruh dunia. Global Carbon Project, sebuah kolaborasi penelitian tim ilmuwan multinasional yang terdiri lebih dari 90 institusi, menerbitkan penelitian pada tanggal 5 Desember 2023, yang menunjukkan bahwa emisi karbon global dari bahan bakar fosil telah meningkat pada tahun 2023 dan telah mencapai tingkat rekor (www.sustainability.stanford.edu). Menurut para peneliti, emisi karbon dioksida dunia diperkirakan akan melampaui 40 miliar ton pada tahun 2023, dengan sekitar 37 miliar ton berasal dari bahan bakar fosil. Menurut World Bank, gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global sebagian besar terdiri dari emisi karbon dioksida. Selain itu, World Bank menjelaskan bahwa keseimbangan radiasi bumi terganggu ketika gas rumah kaca ditambahkan ke atmosfer oleh manusia.

Territorial (MtCO₂)

Rank	Country	MtCO ₂
1	China	11397
2	United States of America	5057
3	India	2830
4	Russian Federation	1652
5	Japan	1054
6	Indonesia	729
7	Iran	691
8	Germany	666
9	Saudi Arabia	663
10	South Korea	601

Gambar 1.1 Grafik Peringkat Negara Penyumbang Emisi Karbon Dunia Tahun 2022

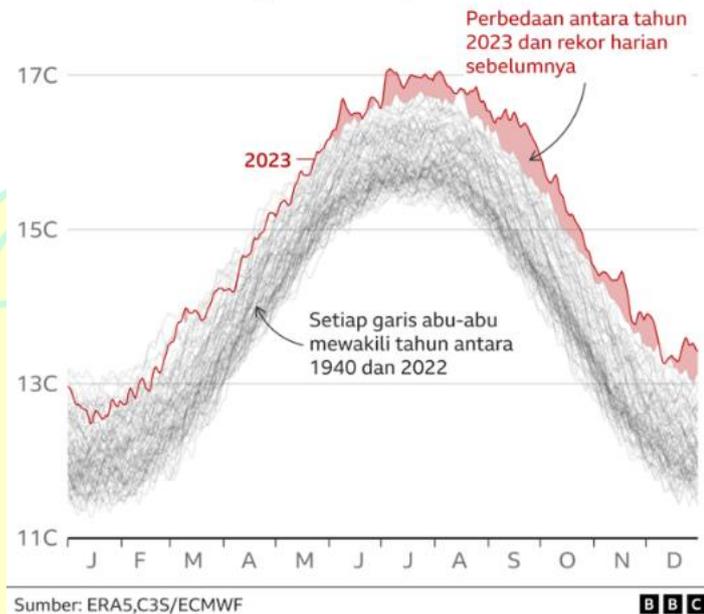
Sumber: www.globalcarbonatlas.org/emissions/carbon-emissions/

Berdasarkan studi terbaru yang dirilis oleh tim ilmiah Global Carbon Project, Indonesia termasuk di antara 10 negara teratas secara global dalam hal emisi karbon. Menurut catatan, Indonesia menghasilkan 730 juta ton karbon pada tahun 2022. Jumlah ini menunjukkan peningkatan paling besar dibandingkan negara lain, yakni naik 18,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Data studi situs Global Carbon Atlas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat sekitar 36.000 metrik ton karbon dioksida (MtCO₂) di atmosfer. Indonesia menempati peringkat ke-6 di antara negara-negara penyumbang emisi dengan 728.883 MtCO₂, atau hampir 2% dari total emisi karbon yang tercatat di seluruh dunia. Indonesia menjadi penghasil emisi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2022 dengan emisi karbon global tertinggi.

Indonesia dan negara-negara lain saat ini belum memiliki komitmen yang cukup kuat untuk melakukan transisi menuju energi berkelanjutan. Hal ini dibahas pada KTT COP-28, konferensi tahunan PBB yang membahas isu-isu iklim, dimana pengurangan emisi yang dilaporkan oleh negara-negara anggota COP masih bersifat sukarela dan tidak diwajibkan. Suhu rata-rata dunia pada tahun 2023 diperkirakan meningkat 1,48 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu pada era pra-industri, yang berlangsung antara tahun 1850 hingga 1900 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023). Pemanfaatan bahan bakar fosil, khususnya batu bara, merupakan salah satu faktor besar penyebab peningkatan emisi di Indonesia. Tingginya laju deforestasi dan konversi lahan di Indonesia juga merupakan faktor lainnya (Andrian & Kevin, 2020).

Suhu global mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023

Suhu udara rata-rata global harian, 1940-2023



Gambar 1.2 Grafik Peningkatan Suhu Global Tahun 2023

Sumber: www.bbc.com/indonesia/articles/c8722p5pgrmo

Pergeseran musim hujan di Indonesia selama 3 bulan dan gagal panen akibat cuaca ekstrem di berbagai daerah menjadi bukti bahwa krisis iklim sudah di depan mata dan perlu penanganan serius. Sebagai bagian dari *Paris Agreement*, Indonesia menjadi salah satu negara yang diundang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Indonesia berharap dapat meningkatkan penyerapan emisi karbon melalui investasi dan mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh negara-negara kaya dalam mengembangkan berbagai sektor pengurangan emisi.

Pelepasan gas rumah kaca, yang merusak lapisan ozon dan ekosistem bumi, telah menjadi fokus upaya intensif pemerintah Indonesia dalam

beberapa tahun terakhir untuk mengurangi emisi karbon. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, Kementerian Lingkungan Hidup menciptakan program penilaian PROPER pada tahun 1995. Untuk menanggapi tingkat pengaturan dan memotivasi dunia usaha untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya, Salah satu cara bagi perusahaan untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja lingkungan yang sangat baik adalah melalui pengungkapan emisi karbon (Jannah & Muid, 2014). Namun sayangnya, pengungkapan emisi karbon pada perusahaan-perusahaan Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

Teori legitimasi terbantahkan dengan sedikitnya jumlah emiten yang mempublikasikan emisi karbon. Hal ini mungkin terjadi karena tingginya biaya pengungkapan emisi tersebut yang mungkin merugikan perusahaan (Amaliyah & Solikhah, 2019). Keputusan yang dibuat oleh kreditor dan investor tidak hanya berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan saja. Pentingnya pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan menyebabkan banyak peneliti melakukan penelitian tentang pengungkapan tersebut.

Pengungkapan emisi karbon dianggap dapat berdampak terhadap kenaikan atau penurunan citra perusahaan di mata publik, sehingga mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Sari & Budiasih (2021) Pengungkapan emisi karbon adalah pengungkapan yang mengevaluasi emisi karbon suatu organisasi dan mengidentifikasi tujuan pengurangan emisi.

Menurut Rachmawati (2021), nilai perusahaan adalah suatu kondisi di mana perusahaan mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan harga saham yang diperoleh dari kegiatan operasional mereka.

Hasil penelitian dari beberapa studi menyatakan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan. Blesia et al. (2023), Noor & Ginting (2022), Halimah et al. (2020), Gabrielle & Toly (2019), Halimah et al. (2020), Rachmawati (2021), Lee & Cho (2021), Sari & Budiasih (2021), dan Hardiyansah et al. (2021) menyatakan pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga nilai suatu perusahaan akan meningkat seiring dengan jumlah emisi karbon yang diungkapkannya. Sebaliknya, Kurnia et al. (2020), Primanandari & Budiasih (2021), Firmansyah et al. (2021), Anggita et al. (2022), Asyifa & Burhany (2022), Putikadea & Siregar (2023), dan Afnilia & Astuti (2023) menyatakan bahwa dengan perusahaan mengungkapkan emisi karbon, hal itu tidak dapat membantu perusahaan meningkatkan nilai perusahaannya.

Dalam membuat keputusan investasi, para pihak ketiga turut memperhatikan dan mempertimbangkan faktor non-finansial termasuk data tata kelola perusahaan. Transparansi merupakan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang harus diterapkan oleh perusahaan *go public*. Negara-negara berkembang sering dianggap memiliki tata kelola perusahaan yang kurang mapan dan penegakan hukum yang kurang memadai. Meskipun demikian, pemahaman mengenai praktik tata kelola yang baik—secara umum atau

dalam konteks tertentu—masih belum memadai, bahkan di negara-negara maju (Merchant & Van der Stede, 2017).

Penelitian terdahulu turut melihat aspek non keuangan, yaitu *corporate governance* sebagai variabel yang dapat mempengaruhi interaksi pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini memasukan aspek non keuangan yaitu mekanisme *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi. Hal ini masih belum banyak diteliti mengingat penelitian terdahulu mayoritas menggunakan aspek keuangan pada nilai perusahaan. Penelitian ini berkontribusi dalam mengkonfirmasi teori legitimasi dan teori keagenan dengan menjawab peran tata kelola perusahaan dalam memoderasi hubungan tingkat pengungkapan emisi karbon dengan nilai suatu perusahaan.

Tata kelola perusahaan dapat diartikan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan atau sebagai seperangkat aturan yang menetapkan hak dan kewajiban manajemen, kreditur, pemerintah, perusahaan, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya (FCGI). Dalam penelitian ini, mekanisme tata kelola Perusahaan diwakili oleh Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen yang digunakan untuk menilai lebih spesifik apakah mekanisme tata kelola perusahaan dapat memperkuat pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menemukan korelasi positif atas hubungan langsung antara dewan komisaris dan tingkat pengungkapan emisi

karbon. Ukuran dewan yang lebih besar cenderung mengalokasikan sumber daya keuangan yang besar untuk melaksanakan lebih banyak inisiatif lingkungan seperti pengungkapan emisi karbon (Nasih et al., 2019). Menurut Zanra et al. (2020) komitmen dewan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon tercermin dalam ukuran dewan komisaris.

Pernyataan ini didukung oleh Riantono & Sunarto (2022) bahwa sebuah perusahaan dapat bekerja lebih keras untuk mencapai transparansi emisi karbon kepada para pemangku kepentingannya ketika dewan komisaris lebih besar. Namun, hasil penelitian Kilic et al. (2018), Trufvisa & Ardiyanto (2019), Akbaş & Canikli (2019), Astuti & Setiany (2021), dan (Sari & Hudaya, 2023) bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, dimana ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap desain emisi karbon.

Berdasarkan argumen Nasih et al. (2019), keterlibatan investor institusi yang independen dapat meningkatkan nilai perusahaan, memperbaiki praktik tata kelola perusahaan dengan meningkatkan efektivitas upaya pengawasan, dan mendorong pengungkapan sukarela. Menurut Akbaş & Canikli (2019), Amaliyah & Solikhah (2019), dan Zanra et al. (2020) kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan dapat mendorong pengungkapan emisi karbon yang lebih tinggi. Berbeda dengan Ardillah & Rusli (2022) dan (Sari & Hudaya, 2023) yang menyatakan bahwa investor institusi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional suatu perusahaan dapat

mengurangi pengungkapan emisi karbon karena tidak ada manajemen yang menekan organisasi untuk melakukan hal tersebut (Ardillah & Rusli, 2022).

Komisaris independen mempunyai pilihan untuk mendesak organisasi untuk memberikan informasi dan sinyal kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan (Saraswati et al., 2021). Terbukti secara empiris bahwa komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan manajerial, mendorong keterbukaan, dan meningkatkan pengungkapan emisi karbon Trufvisa & Ardiyanto (2019) dan Zanra et al. (2020). Astuti & Setiany (2021) dan Ardillah & Rusli (2022) memperkuat hasil penelitian tersebut dengan menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kilic et al. (2018), Nasih et al. (2019), Pramuditya & Budiasih (2020), Purnayudha & Hadiprajitno (2022), dan Sari & Hudaya (2023) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak dapat mendorong perusahaan mengungkapkan emisi karbon.

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti dampak pengungkapan karbon terhadap nilai perusahaan menemukan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan dampak positif pengungkapan karbon terhadap nilai perusahaan (Halimah et al., 2020; Rachmawati, 2021; Lee & Cho, 2021; Hardiyansah et al. 2021; Blesia et al., 2023; Noor & Ginting, 2022), sedangkan penelitian lain misalnya Firmansyah et al. (2021), Anggita et al. (2022), Asyifa & Burhany (2022), Putikadea & Siregar (2023), dan Afnilia & Astuti (2023) mengungkapkan dampak negatif atau tidak ada

dampak. Inkonsistensi hasil ini mungkin terjadi karena hilangnya efek moderasi dari variabel lain, maka dari itu dalam menganalisis hubungan antara dua variabel, hubungan moderasi sangatlah penting (Namazi & Namazi, 2016). Peneliti berpendapat bahwa salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi hubungan antara pengungkapan karbon dan nilai perusahaan adalah tata kelola perusahaan.

Disamping minimnya penelitian mengenai hubungan moderasi tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan karbon dan nilai perusahaan, berdasarkan penelitian Nahda & Harjito (2011), Wijaya & Wirayati (2019), dan Muhammad & Aryani (2021) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela akan meningkatkan nilai perusahaan pada saat indeks *corporate governance* perusahaan meningkat. Namun, menurut (Fatchan & Trisnawati, 2016), Firmansyah et al. (2021), dan Blesia et al. (2023) hubungan antara pengungkapan sukarela dan nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh penerapan tata kelola perusahaan.

Dengan demikian, berdasarkan fenomena yang sudah dijabarkan sebelumnya, peneliti menemukan adanya gap secara empiris bahwa kemampuan perusahaan untuk mempertahankan nilai perusahaannya di era perubahan lingkungan ini tidaklah cukup hanya dengan meningkatkan profitabilitas saja, faktor *profit*, *people*, dan *planet* juga turut menjadi pertimbangan bagi para investor. Namun publikasian emisi karbon di Indonesia saat ini minim dan belum merata dikarenakan hal ini masih bersifat sukarela, sehingga membuat teori legitimasi terbantahkan.

Selain itu, peneliti melihat adanya gap kontradiksi antara pengungkapan emisi karbon, nilai perusahaan, dan tata kelola perusahaan. Dimana ditemukan hasil yang inkonsistensi pada penelitian terdahulu. Serta masih jarang ditemukannya penelitian terdahulu yang menguji mekanisme *corporate governance* sebagai variable moderasi antara hubungan pengungkapan emisi karbon dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Peran *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi dari Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap Nilai Perusahaan”**

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji mengenai pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan. Begitu juga dengan pengujian pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon dan nilai perusahaan. Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, masih minim peneliti yang membahas mekanisme *corporate governance* sebagai variabel moderasi antara pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan. Selain itu, beberapa penelitian menyimpulkan hasil yang kontradiksi pada penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian mengenai pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap nilai perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel moderasi, sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan emisi karbon berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan komisaris dapat memoderasi pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan yang di moderasi oleh ukuran dewan komisaris sebagai variabel mekanisme *corporate governance*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan yang di moderasi oleh variabel mekanisme *corporate governance* yaitu komisaris independen.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan yang di moderasi oleh variabel mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi dan konfirmasi atas teori legitimasi, teori keagenan, serta dapat memberikan kerangka kerja yang berguna untuk penelitian selanjutnya dalam bidang pengungkapan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan.
- b. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor tata kelola perusahaan yang memoderasi hubungan antara pengungkapan emisi karbon dan nilai perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan teori dan praktik manajemen yang lebih holistik dan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu perusahaan dan organisasi dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menjalankan operasi mereka dengan lebih berkelanjutan.
- c. Adanya pembuktian atas gap penelitian yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai *corporate governance* sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh pengungkapan emisi karbon pada nilai perusahaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan emisi karbon dan penerapan praktik tata kelola

perusahaan yang baik. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi, manajer dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang bagaimana mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan emisi karbon serta meningkatkan nilai perusahaan.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat membantu regulator dalam mendorong penerapan praktik berkelanjutan dalam bisnis. Regulator dapat memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada terkait dengan pengungkapan emisi karbon dan praktik tata kelola. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan panduan, pedoman, atau peraturan yang memperkuat perlindungan investor dan mendorong transparansi dalam pengungkapan emisi karbon.
- c. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi pemangku kepentingan eksternal seperti investor, regulator, dan masyarakat umum. Dengan memahami bagaimana praktik tata kelola perusahaan memoderasi hubungan antara pengungkapan emisi karbon dan nilai perusahaan, pemangku kepentingan eksternal dapat membuat keputusan investasi dan regulasi yang lebih terinformasi.